



SEJARAH DAN PROSPEK DEMOKRASI

Dadang Supardan

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Email: dangsu57@yahoo.co.id

Naskah diterima : 3 Desember 2015, direvisi : 11 Desember 2015, disetujui : 17 Desember 2015

Abstract

This article was written for the anxiety of the phenomenon of the rise of the idea of democracy as if change is to be erratic form of government, not driven by reason and rational needs. That since its inception, the idea of democracy increasingly widespread after experiencing various historical events, especially when the formulation of the American Constitution in 1776 and the French Revolution of 1789. The democratic system is becoming more popular among followers of republicanism and is a critique of the dominance of the monarchy system in Europe. Nowadays, democracy can be seen as a 'product' as that term is defined previously as a 'source of power' rather than as 'a method of governance'. Despite modern democracy is a complex device, but logic is expressed seem to contain a single principles. That democracy contains elements of popular participation, majority rule, minority protection, individual freedom, freedom guaranteed by law, participation in policy formulation at all levels, as well as equality. However, democracy is not without flaws, both conceptually maupun practice, given the many democracies that do not accommodate the interests of the sovereignty of the environment (ecocracy).

Keywords: democracy; popular participation; individual liberty; ecocracy

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk kegelisahan terhadap fenomena maraknya paham demokrasi yang seolah-olah menghendaki perubahan bentuk pemerintahan secara erratic, bukan didorong oleh alasan-alasan dan kebutuhan yang rasional. Bahwa sejak kelahirannya, paham demokrasi semakin berkembang luas setelah mengalami berbagai peristiwa historis, terutama ketika perumusan Konstitusi Amerika 1776 maupun Revolusi Prancis 1789. Sistem demokrasi semakin populer di kalangan pengikut aliran republikanisme dan sekaligus merupakan kritik terhadap dominasi sistem monarki di Eropa. Dewasa ini, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu 'produk' karena sebelumnya istilah tersebut lebih diartikan sebagai 'sumber kekuasaan' dibandingkan sebagai 'suatu cara memerintah'. Kendatipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks, namun logika yang diekspresikan tampak mengandung suatu prinsip tunggal. Bahwa demokrasi mengandung unsur partisipasi rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kebebasan individual, kemerdekaan yang dijamin undang-undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, serta persamaan hak. Namun, demokrasi bukan tanpa cacat, baik secara konseptual maupun praktik, mengingat banyak negara demokrasi yang tidak mengakomodir kepentingan kedaulatan lingkungan (ecocracy).

Kata kunci: demokrasi; partisipasi rakyat; kebebasan individual; ecocracy

Pengutipan: Supardan, D. (2015). *Sejarah dan Prospek Demokrasi*. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 2015, 125-135. doi:10.15408/sd.v2i2.2811.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>

A. Pendahuluan

Proses berdemokrasi dalam substansinya dapat juga dimetaforakan sebagai dialog yang terbuka dan fair sebagai manifestasi terbukanya ruang partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Dialog utama dari demokrasi itu mencakup bahwa manusia sebagai makhluk politis. Artinya, di satu sisi manusia adalah makhluk yang secara alamiah terdorong untuk membentuk suatu komunitas hidup bersama, yakni komunitas politis. Sebagaimana dikemukakan Aristoteles dalam buku klasiknya *Nicomachean Ethics*¹ dan klaim *Politics*.² Hal ini penting untuk menjamin keberadaan manusia itu sendiri, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaannya.

Di sisi lain demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Perdamaian yang sesungguhnya hanya mungkin tercipta jika masyarakat menerapkan sistem demokrasi secara konsisten, mengingat sistem demokrasi mengandaikan jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban sesama manusia. Demokrasi merupakan konsep nilai dan praksis komunikatif yang membebaskan karena berorientasi pada terbangunnya tatanan masyarakat yang bebas, setara, berkeadilan, inklusif, dan toleran dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Pada tataran substantif-prosedural, demokrasi membuka partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Jelas bahwa kehidupan demokrasi mengandaikan kebersamaan, kolektivitas bukan individualitas absolut. Selama ini bentuk pemerintahan demokrasi memang diakui oleh banyak pengamat sebagai bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut dan memiliki prospek yang positif.

Akan tetapi, demokrasi bukanlah sebuah mahakarya yang tanpa cacat. Di samping wujud demokrasi itu sendiri yang bersifat relatif dan sangat kontekstual, apa yang dikatakan Abraham Lincoln³ “*government of the people, by the people, for the people...*” dalam implementasinya tidak sedikit

yang skeptis. Di sisi lain, terdapat ketimpangan yang mendasar dalam teori demokrasi yang sering menegaskan prinsip-prinsip *ecocracy*⁴ atau kedaulatan lingkungan hidup, dan cenderung mementingkan antroposentris. Artinya, sistem demokrasi semata-mata mengutamakan kepentingan manusia samberi mengabaikan kepentingan lingkungan organisme maupun non-organisme.

B. Sejarah Demokrasi

Terminologi demokrasi kini tak ubahnya sebuah slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan suatu bentuk pemerintahan yang mengedepankan hidup saling berdampingan, hal mana antara rakyat dan penguasa dapat duduk bersama secara harmonis. Pada awal kelahirannya system demokrasi tidak diminati oleh banyak orang. Aristoteles dalam *Politics*, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani, seperti tercantum dalam buku Plato yang berjudul *Republic*.⁵

Berbeda halnya ketika terjadi Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rhode 1641, dan pada masa seputar perumusan Konstitusi Amerika 1788. Tetapi yang paling memberikan sumbangan terhadap konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis 1789.⁶ Sejak saat itu istilah demokrasi seolah-olah menjadi nama baru bagi

4 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945* (Jakarta: Rajagrafindo/Rajawali Pers, 2009).

5 Edmund Burke, *Speech to the Electors of Bristol*, 3 November 1794. Lihat pula Kenneth Minogue, “Democracy” dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia, Second Edition* (London and New York: Routledge, 2004), h. 214. Lihat pula yang diadaptasi dari Aristoteles “*Politics*” diterjemahkan oleh Benjamin Jowett, (Oxford University Press, 1921), h. 26-30.

6 Terjadi dengan penyerangan ke penjara Bastille 1789 sebagai simbol absutisme raja-raja Prancis, dan rvolusi tersebut mengumandangkan slogan *liberté, égalité, fraternité*. Revolusi tersebut berdampak abadi terhadap sejarah Perancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan, di mana Monarki absolut yang telah memerintah Perancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun. Rakyat Perancis mengalami transformasi sosial politik yang epik; feodalisme, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal baru.

1 Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terjemahan Benjamin Jowett (Oxford University Press, 1921), h. 26-30.

2 Aristoteles, *Politics*, 1253a1-3 bahwa manusia adalah “binatang politik” (zo-onpolitikon), bersama dengan pernyataan pada 1252b30 bahwa polis atau komunitas politik ada secara alami.

3 Lihat teks pidato Abraham Lincoln The Gettysbury Address, 19 November 1863 dalam William E. Gienapp (2002) *Abraham Lincoln and Civil War America, 1 edition* (New York: Oxford University, Press, 2002), h. 184.

aliran Republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lembaga monarkhi di Eropa.

Demokrasi merupakan bentuk suatu “produk” karena nama tersebut sebelumnya lebih diartikan sebagai “sumber kekuasaan” dibandingkan sebagai “suatu cara memerintah”. Kemudian sekitar abad ke-19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya seperti keinginan liberal, sehingga bentuk dominan demokrasi dewasa ini juga demokrasi liberal.⁷ Berbagai kondisi tersebut merupakan kulminasi evolusi moral manusia. Politik di masa itu hanya untuk kaum pria dewasa, dan baru kemudian menjangkau wanita, selanjutnya merangkul kelompok orang muda yang berusia 18 tahun, dan saat itu dinikmati pula oleh pasien-pasien di rumah sakit jiwa sekalipun.

Dewasa ini konsep demokrasi sering diasumsikan sebagai konsep yang baik, karena merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh para akademisi, seperti MacGregor Burns⁸ yang memberikan pengertian demokrasi sebagai:

A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate.

Begitu juga penulis lain seperti Henry B. Mayo⁹ yang mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:

A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.

Dua rumusan di atas telah memberikan pemahaman umum terhadap makna suatu

demokrasi, yaitu: (1) demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, (2) orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum, dan (3) kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Dalam perkembangannya, demokrasi dapat dimetaforakan sebagai lahan yang subur dalam pengembangan politik pemerintahan. Tidak diragukan lagi bahwa pada setiap perkembangan kearah pemerintahan demokrasi, tidak pernah sempurna sehingga sering mengecewakan pendukungnya. Bentuk idealnya pun sering berubah seiring dengan adanya perbaikan-perbaikan ide demokrasi itu sendiri. Dasar bagi perluasan itu dibentuk oleh kenyataan bahwa demokrasi merupakan suatu istilah Yunani, dengan alasan khusus untuk menggambarkan suatu perangkat kelembagaan yang berakar pada masa abad pertengahan. Unsur terpenting adalah perwakilan¹⁰ yang –seperti diyakini oleh para “bapak pendiri” Amerika—akan dapat meredam semangat penerapan kekuasaan di benua yang luas wilayahnya itu. Sifat Yunani dari istilah demokrasi mengisyaratkan praktek perwakilan bukan hanya terdapat pada era demokrasi modern, namun lebih merupakan sebagai “kekurangan yang tak terselesaikan” dan bersumber dari ukuran mutlak bangsa-bangsa masa kini dibandingkan dengan negara-negara kota di zaman Yunani dahulu. Namun dalam realitanya pemerintahan masa kini sama sekali tidak terkait dengan demokrasi model Yunani Kuno itu.

Perlu dipahami, sekalipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks, logika yang diekspresikannya tampak mengandung suatu prinsip tunggal. Bahwa demokrasi dapat dikenal dengan adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kondisi yang menyenangkan hampir semua pihak, kemerdekaan yang dijamin undang-undang,

7 Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Publication. (Penguin, 1992). Lihat pula Barry Holden, Democracy, dalam William Outhwaite (Ed), *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, alih bahasa Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 198.

8 MacGregor Burns, *Government by the People* (Prentice Hall, 2003), h. 3

9 Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (1960), h. 70

10 Barry Holden, *op.cit.* h. 198

partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, persamaan hak, dan sebagainya. Partai-partai mengakui satu atau beberapa prinsip tersebut sesuai dengan kondisi, namun hampir semua partai di dunia—kecuali partai-partai fasis pada tahun 1918-1945—jarang gagal memperoleh legitimasi sebagai sebuah partai yang belandaskan demokrasi. Prinsip demokrasi dengan demikian merupakan sebuah prinsip yang selalu berubah untuk masyarakat yang juga selalu berubah dalam upaya menyempurnakan konstitusinya.

Diatas sudah dikemukakan bahwa demokrasi sering ditempatkan sebagai sebuah slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintah yang diperintah berdampingan dengan rakyat yang berkuasa secara harmonis dengan mengedepankan kedaulatan ada ditangan rakyat seraya berusaha meraih kebebasan individu yang luas. Untuk alasan itulah teori-teori nasionalis mendorong berakhirnya kerajaan-kerajaan besar di Eropa yang harus berubah, dianggap sebagai sumber utama bagi prinsip demokrasi yang dicita-citakan, karena kebanyakan orang berasumsi bahwa manusia ingin diperintah oleh para politisi yang segolongan dengan mereka. Walaupun terjadi pergulatan pemikiran, bahwa masalah-masalah kependudukan yang terjadi di berbagai daerah khawatir membuat penduduk di daerah-daerah itu harus diperintah oleh “orang asing” (bukan raja yang dikenal), dan di satu sisi banyak masyarakat yang lebih suka untuk diperintah berdasarkan tata cara sebuah kerajaan. Lain lagi dengan pemikiran pendukung demokrasi, jika pemerintahan dipegang oleh “orang asing”, berarti hal itu lebih dari sekedar prinsip kebangsaan, yang menjadi bagian dari bangsa itu. Oleh karena itu agar diakui demokratis, kaum pendukung golongan ini berusaha membujuk subyek mereka bahwa mereka diperintah sesuai dengan keinginan mayoritas. Maka kaum minoritas harus berjiwa besar untuk menerima konsekuensi tersebut dalam tatanan masyarakat demokrasi.

Demokrasi hanya dimungkinkan jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat yang lain, dan mengorganisir diri untuk tindakan

politis tertentu. Dalam praktiknya tidak ada negara yang benar-benar demokratis sampai munculnya suatu oposisi untuk mengkritik pemerintah, mengorganisir dukungan, dan bersaing dalam pemilihan umum. Namun banyak negara, oposisi didasarkan pada kesukuan, kebahasaan, ataupun kedaerahan, yang tidak mengakui suatu kesamaan mendasar dalam kehidupan kenegaraan. Bilamana partai-partai politik dibentuk berdasarkan unsur *primordial* seperti itu, maka lembaga-lembaga demokrasi cenderung membangkitkan pertengkaran daripada usaha taat hukum. Dalam situasi tersebut, demokrasi tidak mungkin tercipta, dan produk jadinya adalah kekuatan tunggal. Misalnya, angkatan bersenjata yang menyatakan berdiri “di atas” semua golongan, atau terkadang suatu partai ideologis yang mempunyai sebuah doktrin yang mengkultuskan suatu elemen universal yang telah lama hilang. Negara-negara yang mempunyai partai tunggal seringkali mendasarkan legitimasi mereka kepada suatu bentuk demokrasi yang eksentrik dengan aneka embel-embel seperti “demokrasi murni, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin” dan sebagainya.

Pada kenyataannya, istilah partai mengandung arti yang majemuk dan berbedabeda. Namun pada negara-negara partai tunggal, partai merupakan suatu bentuk entitas politik yang lain sama sekali, klaim mengenai demokrasi hanya merupakan penghias belaka. Namun hal itu tidak berarti bahwa pemerintah-pemerintah seperti itu sama sekali tidak mengandung kebaikan. Sebuah impian yang mustahil untuk berpikir bahwa satu bentuk pemerintah (demokratis misalnya) dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua orang.

Demokrasi sebagai suatu konsep ideal yang begitu meluas terutama sejak abad ke-19 sampai sekarang, sebenarnya mengabaikan warga negara yang secara rasional reflektif selalu melihat pilihan-pilihan yang terbuka bagi mereka secara luas. Ilmuwan politik masa kini banyak memusatkan perhatiannya pada proses demokrasi yang kadang juga irrasional. Mungkin ada benarnya, beberapa kalangan mengatakan bahwa apatisisme politik jauh lebih disukai daripada antusiasme politik yang ada kalanya

bisa membahayakan bentuk pemerintahan konstitusional.

C. Prospek Demokrasi

Mencermati prospek demokrasi, sering menimbulkan beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimanakah prospek demokrasi di dunia ini? *Kedua*, apakah rezim-rezim negara-negara yang baru merdeka akan semakin demokratis? Dua pertanyaan tersebut mempunyai relevansi intelektual dan kebijakan jauh ke belakang, terutama untuk tahun 1980-an.

Selama tahun 1950-an dan awal 1960-an, para ilmuwan seperti Huntington¹¹ dan lainnya yang membahas masalah ini pada umumnya optimis bahwa dekolonisasi dan pembangunan ekonomi akan melipatgandakan rezim demokrasi. Dengan alasan bahwa sejarah yang akan datang dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan ini. Selain itu orang akan pesimis terhadap alasan-alasan menyangkut retaknya sistem demokrasi tersebut. Hal ini bisa dilihat pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Prospek demokrasi tampaknya semakin cerah kembali, dan para ahli ilmu sosial memberikan tanggapan serupa, walaupun mereka tetap mengedepankan pemikiran kritis.

Kajian seperti ini penting mengingat sekurang-kurangnya terdapat empat alasan. *Pertama*, masa depan demokrasi erat kaitannya dengan masa depan kebebasan di dunia. Demokrasi dapat dan telah menyalahgunakan hak-hak kebebasan individu, dan kekuasaan totalitarianisme bagi warga warganegarannya. Kebebasan dalam arti tertentu adalah suatu sifat yang unik dari demokrasi. Oleh karena itu, bila seseorang menginginkan kebebasan sebagai nilai sosial yang tertinggi, maka ia juga pasti menginginkan demokrasi.¹² *Kedua*, bagi Amerika khususnya, masa depan demokrasi di mana-mana adalah hal penting, mengingat demokrasi adalah bukan hanya alat untuk pencapaian tujuan bagi Amerika Serikat saja, tetapi juga bagi Negara manapun.¹³

Ketiga, adalah “rumah yang terbagi dalam dirinya sendiri”, kata Abraham Lincoln, “Pemerintah tidak dapat bertahan secara permanen bila separoh budak dan separoh merdeka”. Sekarang ini dunia bukanlah sebuah rumah tinggal terpisah, melainkan semakin terpadu satu sama lain dan saling ketergantungan.¹⁴ *Keempat*, baik perluasan maupun kemunduran demokrasi mempunyai implikasi terhadap nilai-nilai sosial lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, persamaan sosio-ekonomi, stabilitas politik, keadilan sosial, dan kemerdekaan nasional. Dalam masyarakat, suatu tingkat pembangunan ke arah kemajuan sering selaras dengan tingkat demokrasi yang tinggi. Masalah tepat tidaknya demokrasi bagi negara-negara miskin, dalam konteks ini adalah suatu hal yang sentral. Pada masyarakat majupun hanya dapat mencapai demokrasi dengan mengorbankan beberapa nilai penting lainnya, seperti keamanan nasional.¹⁵

Dalam hal ini diperlukan analisis empiris untuk menjawab pertanyaan: Kebijakan apakah yang harus digunakan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan individu untuk mendorong meluasnya demokrasi? Dalam hal ini, Peter Bachrach menjelaskan bahwa tujuan tertinggi sebuah sistem pemerintah demokratis adalah memaksimalkan perkembangan setiap individu.¹⁶ Sedangkan Robert Dahl menjelaskan bahwa sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warganegarannya.¹⁷ Definisi semacam ini bisa relevan terhadap teori politik normatif, namun tidak banyak manfaatnya untuk analisis empiris dalam komparatif. Mengapa demikian? *Pertama*, definisi-definisi tersebut sering kabur dan bersifat umum, sehingga sama sekali tidak memungkinkan diterapkan dalam praktik berdemokrasi. *Kedua*, demokrasi dapat juga didefinisikan sedemikian luas sehingga hampir identik dengan semua kebijakan umum, termasuk keadilan sosial, persamaan, kebebasan, pemenuhan diri, kemajuan, dan berbagai ragam

11 Samuel P. Huntington, *Will More Countries Become Democratic?* (Political Science Quarterly 99, No.2 Summer, 1984), h. 193-218.

12 Sanford Lakoff, *Democracy, History, Theory, Practice* (Oxford: Westview Press, 1996), h. 157

13 Michael W. Doyle. “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Bagian I, *Philosophy and Public Affairs*, 12 (1983) h. 213.

14 Lincoln's Speech. *Reply to Douglas* (Springfield, 1858). Lihat pula Samuel P.Huntington *op.cit.* h. 195.

15 Samuel P.Huntington. *op.cit.* h. 196.

16 Peter Bachrach. *The Theory of Democratic Elitism: A Critique* (Washington, D.C: University Press of America, 1980), h. 24, 98

17 Robert A. Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), h. 2.

lainnya yang baik.¹⁸ Oleh karena itu, menjadi sukar dalam menganalisis hubungan antara demokrasi dengan tujuan-tujuan sosial lainnya.

Untuk itu, dalam analisis komparatif tentang demokrasi dibutuhkan suatu definisi yang lebih bersifat empiris dan institusional. Tulisan ini mengikuti pandangan Joseph A. Schumpeter¹⁹ bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, yang mana para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua orang dewasa berhak memilih. Menurut definisi ini demokrasi mencakup dua dimensi, yaitu persaingan dan partisipasi yang oleh Dahl²⁰ dipandang penting sekali bagi demokrasi poligarki yang sejati.

Menurut Huntington²¹ sejarah munculnya rezim demokrasi modern dapat digolongkan ke dalam empat tahapan. *Tahap pertama*, adalah apa yang disebut sebagai sistem politik demokrasi pada tingkat pemerintahan nasional, yang muncul pertama kalinya di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Abad berikutnya rezim demokrasi perlahan-lahan bermunculan di Eropa Barat dan Utara, di dominion-dominion Inggris, dan beberapa Negara Amerika Latin. Kecenderungan tersebut oleh Alexis de Tocqueville²² telah diramalkan pada tahun 1835 dan oleh James Bryce²³ telah dicatat pada tahun 1920, tampaknya tidak dapat diubah. Pada dasarnya semua perubahan rezim berlangsung dari rezim yang kurang demokratis menuju rezim yang semakin demokratis. Pada akhir periode ini, Bryce dapat menduga dengan tepat mengenai apakah kecenderungan ke arah demokrasi merupakan suatu kecenderungan alamiah, karena hukum umum kemajuan sosial.²⁴ Tahun 1920-an adalah puncak perkembangan demokrasi di antara bangsa-bangsa di dunia. Sementara selama dua dasawarsa berikutnya, demokrasi cenderung

padam di Jerman, Italia, Austria, Polandia, negara-negara Baltik, Spanyol, Portugal, Yunani, Argentina, Brazilia, dan Jepang. Usaha untuk mengamankan demokrasi tampaknya telah mengakibatkan perkembangannya berhenti dan bahkan menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial berhaluan kiri dan kanan yang bermaksud menghancurkannya.

Namun di lain pihak, setelah berakhirnya Perang Dunia II, terdapat suatu perkembangan yang dramatis yang ditandai adanya munculnya rezim-rezim demokratis. Dengan dukungan negara-negara sahabat dan setelitnya, Amerika Serikat memberlakukan demokrasi di Jerman Barat, Austria, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Secara bersamaan proses dekolonisasi berlangsung di negara-negara yang baru merdeka, yang pada permulaan biasanya mengadopsi bentuk politik kekuasaan imperial. Setidak-tidaknya dalam beberapa kasus seperti di India, Israel, Srilanka, dan Filipina, bentuk-bentuk demokrasi dilengkapi dengan substansinya. Negara lainnya seperti Turki dan beberapa negara Amerika Latin, berusaha meniru sistem politik penguasa Eropa yang menang perang. Pada awal tahun 1950-an, proporsi negara demokrasi di antara negara merdeka di dunia telah mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Sedangkan periode keempat, dalam perkembangan rezim demokratis, yakni mulai dari awal tahun 1950-an sampai dengan 1980-an, berbeda dengan tiga periode sebelumnya. Dalam masing-masing periode ini terdapat suatu kecenderungan yang sangat dominan, baik ke arah perluasan demokrasi (1820-1920, dan 1942-1953) ataupun ke arah berkurangnya demokrasi (1920-1942). Dalam masing-masing periode ini sedikit sekali pergeseran rezim yang signifikan melawan kecenderungan yang dominan itu. Tetapi masa tiga puluh tahun, dari awal 1950-an sampai awal 1980-an, tidak ditandai oleh suatu arah yang kuat, baik ke kiri atau ke kanan. Justru yang terjadi adalah campuran antara keduanya. Jumlah rezim demokratis tampak meluas pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, menyusut pada pertengahan 1960-an dan awal 1970-an, dan kemudian meluas lagi pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Catatan secara menyeluruh

18 Samuel P. Huntington, *op.cit.* h. 78.

19 Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper & Row, 1942).

20 Robert Dahl, *op.cit.* h. 4-9. Lihat juga Joseph A. Schumpeter, *op.cit.* h. 269.

21 Samuel P. Huntington, *op.cit.* h. 24.

22 Alexis de Tocqueville, *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Terjemahan Yusi A. Pareanom, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 53.

23 James Bryce, *Modern Democracy* (New Jersey: The McMillan Company, 1921), h. 17.

24 James Bryce, *Ibid.* h. 24.

mengenai perubahan negara demokrasi di dunia belum besar. Oleh karena itu sukar untuk dapat dikatakan bahwa dunia ini semakin demokratis pada tahun 1984 dibanding tahun 1954.²⁵

Namun demikian, stabilitas menyeluruh dalam tingkat demokrasi menunjukkan beberapa perkembangan penting ke dua arah. Dengan beberapa perkecualian yang menyolok, hampir semua negara jajahan yang mencapai kemerdekaannya setelah Perang Dunia II, bergeser dari sistem demokrasi menuju non demokrasi. Sebaliknya beberapa negara bergerak ke arah demokrasi. Antara lain Spanyol, Portugal, Kolombia, Venezuela, Yunani, dan Republik Dominika. Beberapa negara Amerika Selatan, termasuk dua sistem demokrasi yang telah lama berdiri seperti Chili dan Uruguay dan dua sistem komunis yang kurang stabil (Brazilia, Argentina) menjadi negara otoriter-birokratis, dengan pemerintahan militer yang bermaksud mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi pada akhir tahun 1983, Brazilia telah membuat kemajuan yang penting ke arah sistem demokrasi seperti halnya Argentina.

Sementara beberapa negara seperti Peru, Equador, Gana, dan Turki, tampak terombang-ambing antara sistem demokrasi dan nondemokrasi, dalam sebuah pola yang merupakan ciri khas masyarakat praetorian. Di Asia Timur, Korea, Singapura, Indonesia, dan Filipina menjadi kurang demokratis. Taiwan tetap tidak demokratis. Negara-negara Indocina tunduk terhadap totalitarianisme Vietnam. Sedangkan Thailand dan Malaysia tetap demokrasi secara parsial. Sementara, gerakan untuk mendorong Hongaria, Cekoslovakia (sebelum pecah), dan Polandia ke arah politik yang lebih demokratis dihentikan secara oleh Uni Soviet,²⁶ namun sekarang sudah berhasil membebaskan diri dari totalitarianism.

Dalam perkembangan demokrasi, peranan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan mesti menjadi perhatian kritik, terutama datang dari kalangan akademisi dan NGO. Mereka melihat pembangunan di negara-negara berkembang

telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Pembangunan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit politik dan elit ekonomi. Pembangunan hanya dikaitkan dengan pembangunan fisik semata, sedangkan pembangunan mental dan spiritual hanya mendapatkan porsi sedikit. Angin segar bagi pengkritik pembangunan datang dari Amartya Sen,²⁷ ekonom dari Harvard. Dalam karya-karyanya Sen, banyak menulis mengenai ekonomi kesejahteraan dan juga hubungan antara demokrasi dengan kesejahteraan manusia. Menurut Sen, kebebasan manusia amat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi memberi kebebasan kepada manusia. Demokrasi menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat. Demokrasi mempunyai mekanisme *check and balances* dan demokrasi menjamin pergantian pemerintahan dengan damai. Ketiadaan kebebasan secara politik berkorelasi dengan pemenuhan hak-hak yang lain. Hanya dengan demokrasilah kebebasan secara politik dapat dipenuhi. Di negara yang demokratis, sebuah bencana dapat ditanggulangi dengan adanya pers yang bebas, oposisi yang aktif, dan iklim kemerdekaan berpendapat dan berekonomi yang memadai.

Seorang ekonom haruslah memberi saran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang manusiawi. Salah-satu contoh yang diberikan Sen adalah kredit mikro yang diberikan kepada orang-orang miskin dan petani. Hal yang sama dilakukan oleh *Grameen Bank* yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Rakyat miskin diberikan kredit murah dengan tujuan agar mereka dapat mendayagunakan kemampuan mereka dalam berusaha dan bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu dengan bunga yang rendah. *Grameen Bank* adalah contoh keberhasilan dari kredit usaha mikro, kecil dan menengah. *Grameen* adalah contoh dari kebijakan yang membebaskan rakyat kecil dari jeratan rentenir. Budaya menjadi pertimbangan dalam menyalurkan kredit mikro. Ketimpangan jender yang terjadi di pedesaan turut menjadi pertimbangan dalam menyalurkan kredit. Ia

25 Lihat "the Comparative Survey of Freedom" yang dikumpulkan setiap tahun untuk Freedom House (organisasi riset swasta di New York City) oleh Raymond D. Gastil khususnya *Freedom at Issue*, no 17 (1973), h. 2-3; no 70 (1983), h.4. Lihat pula Samuel P. Huntington, *op.cit.*, h. 8.

26 Samuel P.Huntington, *ibid.*, h. 81.

27 Lihat tulisan-tulisan Amartya K. Sen, *Freedom, Rationality, and Social Choice: The Arrow Lectures and Other Essays* (Oxford: Oxford University Press, 2000). Lihat pula *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999), semuanya menekankan betapa penting suatu kebebasan, dan hak-hak dasar lainnya yang tidak kalah pentingnya kearifan budaya timur dengan menegasikan "keserakahan".

menyarankan bahwa seorang ekonom jangan melulu terikat dengan teori-teori ekonomi yang diajarkan di fakultas ekonomi semata. Ia harus mau terjun ke bawah agar dapat memahami gejala masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, demokrasi terus bergulir dan memimpin bentuk pemerintahan hingga sekarang. Di paruh terakhir abad ke-20, diyakini bahwa teori tradisional semakin tergeser oleh teori demokrasi modern yang lebih realistis, yang mengakui kompleksitas sistem politik modern dan kapasitas politik terbatas yang dimiliki oleh rakyat. Dalam hal ini, yang menonjol adalah “teori demokrasi elitis”.²⁸ Namun teoretisi demokrasi elitis pun segera mendapat kritik tajam oleh teoretisi demokrasi partisipatoris, baik dari para ahli ilmu politik maupun futuris. John Naisbitt, seorang futuris ternama Amerika Serikat mengamini dengan memberikan kritik dalam karyanya yang monumental *Megatrends 2000*.²⁹ Ia mengemukakan bahwa demokrasi *representatif* telah bergeser menjadi demokrasi *partisipatif*. Maksudnya, khususnya dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi setiap orang. Dengan demikian, publik secara umum dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat dalam berdemokrasi adalah “partisipasi” yang luas dari seluruh rakyat.³⁰

Partisipasi semacam itu harus juga melibatkan *industrial democracy* dan lebih luas melampaui sistem politik hingga ke lingkungan kerja dan sistem perekonomian umumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Amartya K. Sen³¹ tentang pentingnya kebebasan dan keadilan. Sejarah menunjukkan bahwa kelaparan yang dahsyat tak pernah terjadi di negara merdeka,

demokratis, dan memiliki pers yang bebas. Sen menunjukkan betapa pentingnya kebebasan dan hak politik masyarakat.

Perkembangan terbaru dalam teori demokrasi modern adalah munculnya kritik feminis terhadap sifat dari representasi dalam demokrasi liberal³² dan teori “demokrasi deliberatif” yang berfokus pada pertimbangan rasional sebagai proses pengambilan keputusan kolektif. Kemudian dalam perkembangan baru lainnya yang lebih mengejutkan adalah munculnya perhatian pada gagasan tentang kemungkinan demokrasi global.³³ Tetapi dalam pembuktian adanya demokrasi global tersebut, masih terdapat kontroversi tentang dasar rasional untuk menilai bahwa demokrasi yang kini sudah menyebar luas merupakan sistem pemerintahan terbaik dan tanpa cacat. Ada banyak dukungan dari argumen sebagaimana dikemukakan oleh Barry Holden,³⁴ maupun Robert Dahl tersebut. Meskipun demikian, di bawah pengaruh relativisme dan postmodernisme, tidak ada pembenaran (justifikasi) rasional bagi demokrasi.³⁵

Berbeda dengan kajian berikutnya, tokoh-tokoh ini mendukung demokrasi global sekaligus meragukan prospek demokrasi di era global ini. Sebagaimana dikemukakan bahwa demokrasi telah mengalami perubahan sejak modernisasi di era globalisasi sekarang ini. Perubahan pertama adalah adanya konsep universalisasi dalam globalisasi yang mulai menjanjikan adanya kesamaan hak pada semua orang. Namun kenyataan yang terjadi kemudian tidak demikian. Nyatanya, baik level nasional maupun global, universalisme masih belum benar-benar ada dalam era globalisasi saat ini.³⁶ Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Alan Marc Rieu³⁷ ia menyatakan bahwa universalisme masih merupakan hal yang semu dalam era globalisasi saat ini. Hal ini terbukti dengan masih

32 April Carter dan Geoffrey Stokes, *Liberal Democracy and its Critics* (Cambridge Polity Press, 1998), h. 98-117.

33 Barry Holden, *Global Democracy* (Routledge, 2000).

34 Barry Holden dalam *Understanding Liberal Democracy* (Publisher: Harvester Wheatsheaf, 1993).

35 Seyla Benhabib (Ed) *Democracy and Difference* (Princeton University Press, 1996), h. 97.

36 Hardt, Michael dan Antonio Negri. “The Long March of Democracy”, dalam *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire* (New York: The Penguin Press, 2004), h. 241.

37 Alan Marc Rieu, *Deconstructive Globalization: Universalism, Globality, Diversity* [online], dalam <http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/12/52/PDF>. [Diakses pada 1 Januari 2016]. h.21.

28 William Outhwaite, *op.cit.*, h. 200.

29 William Outhwaite, *op.cit.*, h. 200.

30 Lihat Joseph Losco & Leonard, *Political Theory, Classic and Contemporary Reading* (Roxbury Publishing Company, 2005), h. 134.

31 Amartya Sen, di dalam risalahnya, *Beyond the Crisis: the Development Strategies in Asia*, yang diterbitkan oleh Institute of South East Asian Studies, 1.

adanya marginalisasi berdasarkan berbagai hal, misalnya jenis kelamin atau warna kulit, yang menunjukkan bahwa universalisme belum benar-benar tampak dalam era globalisasi saat ini. Memang dengan liberalisasi ekonomi yang merupakan produk dari globalisasi kemudian juga turut berperan menjadikan universalisme menjadi sebuah hal yang semu. Dengan adanya globalisasi ekonomi, negara dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian. Zimbabwe, misalnya, melakukan penyesuaian dengan program *ESAP (Economic Structural Adjustment Programme)* yang berlaku sejak tahun 1990, menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya liberalisasi ekonomi, negara dituntut untuk melakukan berbagai regulasi yang diharapkan dapat mempromosikan adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya regulasi tersebut, tidak ada yang dapat dilakukan oleh rakyat Zimbabwe selain hanya pasrah dengan kehidupan yang semakin sulit karena harga yang mahal tersebut semakin sulit dijangkau dan mereka juga tidak dapat melakukan tuntutan.³⁸

Pendapat terakhir tentang konsep kedaulatan negara mencakup dua konteks pengertian, yaitu pengertian internal dan eksternal, yakni hubungan antarbangsa dan pengakuan kedaulatan internasional dari negara-negara lain. Dalam pengertian internal, tidak cukup kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dikenal selama ini dalam dunia filsafat hukum dan politik mencakup ajaran tentang kedaulatan Tuhan (*theocracy*), kedaulatan rakyat (*democracy*), kedaulatan hukum (*nomocracy*), dan kedaulatan raja (*monarchy*), tetapi juga *ecocracy*.³⁹ Dalam perspektif kekuasaan negara secara internal ini, melalui pengembangan *ecocracy* maka pengembangan *demokrasi* (kedaulatan rakyat) tidak semata-mata mementingkan kedaulatan rakyat saja, melainkan diperlukan mekanisme yang secara substansial dapat menjamin penyaluran aspirasi dan pendapat dari kehendak rakyat yang berdaulat itu. Oleh karena itu, orang menciptakan lembaga perwakilan rakyat dan partai politik sebagai penyalurnya. Bahkan, kepala pemerintahan eksekutif juga

dipilih langsung ataupun tidak langsung oleh rakyat, sehingga—baik pejabat yang menjalankan fungsi legislatif maupun eksekutif—merupakan wujud dari rakyat yang berdaulat. Di negara demokrasi, para hakim agung juga dipilih melalui mekanisme di parlemen, sehingga dapat dikatakan bahwa para pejabat di lingkungan cabang kekuasaan yudikatif juga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, meskipun hanya secara tidak langsung.

Dalam mengembangkan demokrasi yang baik, aspek-aspek *antroposentrik* dalam demokrasi harus mengakar dan terintegrasi antara manusia dengan aspek-aspek lingkungan alamiahnya (ekokrasi), sehingga dalam merealisasikan demokrasi secara komprehensif yang menampung kepentingan-kepentingan seluruh ekosistem yang ada. Seperti ajakan Presiden Perancis, Jacques Chirac, ketika menjadi pembicara pada forum *Earth Summit 2002* di Johannesburg, Russia, mengenai pentingnya lingkungan hidup kepada generasi mendatang. Dikatakan oleh Jacques Chirac:⁴⁰

“Our house is burning and we look away. Nature is mutilated, over exploited and cannot manage to reconstitute herself any more, and we refuse to admit it. Humanity is suffering (.....). The earth and humanity are imperilled and we are all responsible for this (...). We cannot say that we did not know! Let us beware lest the XXIst century becomes, for future generations, that of a crime against life” (Rumah kita terbakar dan kita hanya menyaksikan. Alam dimutilasi, dieksploitasi secara berlebihan tanpa dapat lagi dipulihkan lagi, dan kita pun tidak mau mengakuinya. Kemanusiaan tengah menderita. Bumi dan kemanusiaan dan kita bertanggung jawab untuk ini. Kita tidak dapat berkata bahwa kita tidak tahu! Marilah kita waspada, demi generasi mendatang, jangan sampai abad ke-21 menjadi abad kejahatan terhadap kehidupan).

Semua fenomena pengrusakan dan kerusakan ekosistem disebabkan oleh adanya kebebasan manusia tanpa kendali. Kebebasan dihasilkan oleh sistem demokrasi yang dikembangkan oleh umat manusia dimana-mana tanpa menyadari bahwa kebebasan itu telah menimbulkan efek samping berupa

38 Olurode, Lai. *Gender, Globalisation and Marginalisation in Africa* (Africa Development: CODESRIA, 2003), h. 76.

39 Ekokrasi suatu kedaulatan lingkungan, di mana kita hidup mengeksploitasi alam semena-mena.

40 President Jacques Chirac's Speech at the Earth Summit, Johannesburg, 2002.

kerusakan ekosistem. Tampaknya terdapat hubungan yang erat antara kerusakan lingkungan dan ekosistem dengan demokrasi. Makin kuat arus demokratisasi dan kebebasan manusia, makin terbuka lebar pula potensi pengrusakan ekosistem yang terjadi. Apalagi, penerapan sistem demokrasi kontemporer selalu diimbangi dan disertai oleh liberalisasi pasar dan pengurangan tanggung jawab negara dalam urusan bisnis dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap individu yang merdeka untuk menguasai dan menggunakan modal dalam mengeksploitasi alam secara besar-besaran.

D. Penutup

Walaupun pada mulanya kehadiran demokrasi bersifat *erratic* dan tidak diminati banyak orang, namun sejak berkobarnya Revolusi Prancis 1789, spirit untuk menerapkan demokrasi menunjukkan gejala yang positif. Bahwa dekolonisasi dan pembangunan ekonomi akan melipatgandakan perkembangan rezim demokrasi. Prospek meluasnya demokrasi akan terbukti secara signifikan bila terdapat proses diskontinuitas penting—misalnya jika perkembangan ekonomi di dunia ketiga berlangsung pada tingkat yang jauh lebih cepat dan mempunyai dampak yang jauh lebih positif terhadap perkembangan demokrasi dibanding sebelumnya. Pesatnya perkembangan demokrasi, di samping dipengaruhi oleh aspirasi negara-negara berkembang yang mencita-citakan tingkat kemajuan politik, HAM, ekonomi yang lebih menjanjikan, juga harus diakui terdapat beberapa kepentingan Amerika Serikat sebagai pionir dan sekutu-sekutunya yang berkepentingan menegakkan politik ideologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan perdamaian.

Bagaimanapun, kemampuan pihak-pihak eksternal (seperti negara Amerika Serikat) mempengaruhi perkembangan demokrasi di seluruh dunia. Keadaan seperti ini mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi di negara lainnya. Prospek meluasnya demokrasi akan terbukti secara signifikan bila terdapat proses diskontinuitas penting—

misalnya jika perkembangan ekonomi dunia ketiga berlangsung pada tingkat yang jauh lebih cepat dan mempunyai dampak yang jauh lebih positif terhadap perkembangan demokrasi dibanding sebelumnya. Atau jika posisi hegemoni Amerika Serikat mantap kembali di dunia seperti pada tahun 1940-an dan 1950-an. Tanpa perkembangan seperti itu, perkembangan demokrasi yang signifikan sulit terjadi. Selain itu, kekuasaan substansial pemerintah yang anti demokrasi (pemerintah totalitarian), maka penolakan demokrasi oleh beberapa tradisi kebudayaan yang mengarah pada perkembangan demokrasi menjadi ujian yang memerlukan kerja keras pendukung demokrasi.

Fokus lainnya yang juga harus mendapat perhatian dalam prospek demokrasi ke depan adalah ekonomi kesejahteraan dan juga hubungan antara demokrasi dengan lingkungan hidup. Karena dalam demokrasi, kebebasan manusia amat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi memberi kebebasan kepada manusia, dan demokrasi menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat. Demokrasi mempunyai mekanisme *check and balances* dan demokrasi menjamin pergantian pemerintahan dengan damai. Selain itu dalam mengembangkan demokrasi yang baik, aspek-aspek *antroposentrik* dalam demokrasi harus juga mengakar dan terintegrasi antara manusia dengan aspek-aspek lingkungan alamiahnya, sehingga dalam merealisasikan demokrasi secara komprehensif juga menampung kepentingan-kepentingan seluruh ekosistem yang ada.

E. Daftar Pustaka

- Aristoteles, (1921) *Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan oleh Benyamin Jowett, Oxford University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Rajagrafindo/Rajawali Pers, Jakarta.
- Aristoteles, (1921). *Politics*, Diterjemahkan oleh Benjamin Jowett, Oxford University Press.

- Bachrach, Peter. (1980). *The Theory of Democratic Elitism: A Critique* (Washington, D.C: University Press of America).
- Bryce, James. (1921). *Modern Democracy*. New Jersey: The McMillan Company.
- Burke, Edmund. (1794). *Speech to the Electors of Bristol*; 3 November 1794.
- Burns, MacGregor. (2003). *Government by the People*. Prentice Hall.
- Dahl, A. Robert. (1985). *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press
- Dahl, A. Robert. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Doyle, W. Michael. (1983). *Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs*, Bagian I, *Philosophy and Public Affairs*, 12 h. 325-345
- Fukuyama, Francis. (1992). *The End of History and The Last Man*, New York: Publication. Penguin.
- Gienapp, E. William. (2002). *Abraham Lincoln and Civil War America, 1 edition*, New York: Oxford University, Press.
- Hardt, Michael dan Antonio Negri. (2004). *The Long March of Democracy*, dalam *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: the Penguin Press.
- Holden, Barry. (2008). *Democracy dalam William Outhwait, Ensiklopedi pemikiran Sosial Modern*, Penerjemah Tri Wibowo, B.S, Jakarta: Prenada Media Group.
- Holden, Barry. (2000). *Global Democracy*, Routledge.
- Holden, Barry. (1996). *Understanding Liberal Democracy*, Publisher: Harvester Wheatsheaf,
- Huntington, P. Samuel. (1984). *Will More Countries Become Democratic?*, Political Science Quarterly, 99, N0.2 (Summer 1984).
- Keneth Minogue, Minogue (2004). "Democracy" dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia, Second Edition*, London and New York: Routledge.
- Lakoff, Sanfor. (1996). *Democracy, History, Theory, Practice*, Oxford: Westview Press, 1996: hlmn: 157.
- Lincoln, Abraham. (1858). *Lincoln's Speech* dalam "Reply to Douglas", at Springfield 8
- Losco, Joseph & Williams, Leonardo. (2005). *Political Theory: Classic and Contemporary Readings*, Roxbury Publishing Company.
- Naisbitt, John, & Patricia Aburdene. (1990). *Megatrends 2000: Ten New Direction for the 1990's*, New York: William Morrow and Company, Inc.
- Olurode, Lai. (2003). *Gender, Globalisation and Marginalisation in Africa*, Africa Development: CODESRIA.
- Pateman, Carole,. (1970). *Participation and democratic theory*, Cambridge England: Cambridge University Press.
- Polybius. (Adaptasi 1927). *The Histories or The Rise of The Roman Empire By Polybius*, Diterjemahkan Oleh Paton, W.R. London, New York: William Heinemann: GP Putman's Sone.
- Plato. (adaptasi, 1968) *The Republic of Plato, Edisi ke-2*, diterjemahkan oleh Allan Bloom, Dicitak ulang dari Perseus Book Group.
- Rieu, M. Alan, "Deconstructive Globalization: Universalism, Globality, Diversity" [online], dalam <http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/12/52/PDF>. [Diakses pada 1 Januari 2016].
- Schumpeter, A. Joseph. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper & Row.
- Sen, K. Amartya. (2000). *Freedom, Rationality, and Social Choice: The Arrow Lectures and Other Essays*, Oxford: Oxford University Press.
- Sen, K. Amartya. (1999). *Development as Freedom*, New York: Oxford University Press.
- Tocqville, Alexis, De,. (2005). *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Terjemahan Yusi A.Pareanom, Jakarta: Yayasan Obor.